

Strategi Keamanan Maritim di Asia Tenggara: Kerjasama Diplomasi maritim di ASEAN

Muh. Fadry Amry Guricci ^{1*}, Seniwati ²

^{1,2} Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM.10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245

Korespondensi penulis: fadryjack@gmail.com

Abstract: Southeast Asia, as a strategic region connecting two of the world's major oceans, faces a range of maritime security challenges, both traditional, such as territorial disputes in the South China Sea, and non-traditional, such as piracy, human trafficking, and illegal fishing. This article discusses maritime security strategies in the region, with a primary focus on maritime diplomacy cooperation under the ASEAN framework. Using maritime security theory, maritime diplomacy, and a literature analysis, the article examines the effectiveness of ASEAN's regional cooperation in addressing the complexities of maritime threats in Southeast Asia. The study's findings indicate that although challenges such as strong nationalism and geopolitical disputes still hinder collaboration, ASEAN has made progress in building more structured cooperation mechanisms. The article emphasizes that strengthening maritime diplomacy between countries, as well as with global actors, is an effective step to ensure stability, security, and sustainability in Southeast Asia's maritime domain.

Keywords: Security, Maritime, ASEAN, Diplomacy

Abstrak: Asia Tenggara, sebagai kawasan strategis yang menghubungkan dua samudra utama dunia, menghadapi beragam tantangan keamanan maritim, baik tradisional seperti sengketa perbatasan di Laut Cina Selatan, maupun non-tradisional seperti perompakan, perdagangan manusia, dan penangkapan ikan ilegal. Artikel ini membahas strategi keamanan maritim di kawasan ini dengan fokus utama kerja sama diplomasi maritim di bawah kerangka ASEAN. Melalui pendekatan teori keamanan maritim dan diplomasi maritim serta analisis pustaka, artikel ini membahas efektivitas kerja sama regional ASEAN dalam menghadapi kompleksitas ancaman maritim di kawasan Asia Tenggara. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun tantangan seperti nasionalisme yang kuat dan sengketa geopolitik masih menghambat kolaborasi, ASEAN telah menunjukkan kemajuan dalam membangun mekanisme kerja sama yang lebih terstruktur. Artikel ini menekankan bahwa penguatan diplomasi maritim antarnegara serta dengan aktor global adalah langkah efektif untuk memastikan stabilitas, keamanan, dan keberlanjutan maritim di Asia Tenggara.

Kata kunci: Keamanan, Maritim, ASEAN, Diplomasi

1. LATAR BELAKANG

Kerja sama keamanan maritim di Asia Tenggara baru-baru ini mulai terinstitusionalisasi. Masalah sejarah, sengketa perbatasan, dan nasionalisme yang kuat telah lama menghambat pembentukan rezim keamanan maritim yang efektif di kawasan ini. Selain itu, Jepang dan China memandang Asia Tenggara, terutama negara-negara pesisir yang menguasai jalur pelayaran utama, sebagai kunci bagi keamanan nasional mereka. Jepang telah mengembangkan program keterlibatan strategis yang solid melalui penjaga pantainya, menganggap kawasan ini sebagai daerah pengaruh alami. Sementara itu, China baru-baru ini memulai program kerja sama maritim dengan beberapa negara pesisir di Asia Tenggara untuk meningkatkan ketertiban di laut. Oleh karena itu, baik Jepang maupun China telah meletakkan dasar diplomatik yang penting untuk membangun kapasitas dan kepercayaan

penjaga pantai di kawasan Asia Tenggara (Llewelyn, 2017, p. 50). Secara keseluruhan, paragraf ini mencerminkan dinamika geopolitik di Asia Tenggara, di mana negara-negara besar seperti Jepang dan China berusaha mempengaruhi kawasan melalui kerja sama keamanan maritim. Meskipun tantangan masih ada, ada indikasi bahwa langkah-langkah menuju kolaborasi yang lebih erat sedang diambil. Hal ini bisa menjadi tanda positif untuk keamanan maritim di masa depan, meskipun dengan kompleksitas yang harus dihadapi.

Pada tahun 2004, Jepang meluncurkan Inisiatif Keamanan Maritim Asia, yang mengumpulkan 16 negara regional untuk mendiskusikan pembajakan di kawasan dan mengeksplorasi inisiatif bersama untuk menghadapi ancaman maritim yang serupa. Insiden pembajakan yang mencolok terhadap kapal tunda Jepang di perairan Asia Tenggara pada tahun 2005 memicu Jepang untuk membangun dan mendanai Information Fusion Centre (IFC) bekerja sama dengan Pemerintah Singapura, yang berkolaborasi erat dengan The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP). Selain itu, Jepang juga berperan penting dalam mendirikan Heads of Asian Coast Guards Meeting (HACGM). Pertemuan ini berfungsi sebagai forum penting bagi 20 pejabat senior penjaga pantai untuk bertemu setiap tahun, membahas isu-isu keamanan maritim sipil, dan membangun kepercayaan di antara negara-negara anggota (Llewelyn, 2017, p. 53). Dalam paragraf ini menggambarkan langkah-langkah strategis Jepang dalam menangani tantangan keamanan maritim, dengan penekanan pada kolaborasi regional dan pengembangan kapasitas bersama untuk mengatasi ancaman yang ada.

Keamanan maritim merupakan isu utama dalam politik Asia Tenggara. Untuk mengatasi ancaman terhadap keamanan maritim, dibutuhkan kerja sama internasional karena sifat ancaman tersebut yang transnasional. Seperti yang diungkapkan oleh wakil perdana menteri Singapura, tindakan satu negara tidak cukup, karena lautan bersifat menyeluruh dan ancaman tidak mengenal batas negara. Kerja sama di kawasan ini saat ini kurang memadai dalam menghadapi ancaman maritim; meskipun demikian, ada faktor struktural, ekonomi, dan norma yang mendorong peningkatan kerja sama. Dalam empat tahun terakhir, terjadi kemajuan yang signifikan, dan faktor-faktor tersebut diharapkan dapat meningkatkan kerja sama lebih lanjut (Bradford, 2005, pp. 1-2). Di paragraf ini lebih menyoroti pentingnya kerjasama multilateral dalam keamanan maritim di Asia Tenggara, mencatat tantangan yang ada, serta menggarisbawahi potensi kemajuan yang bisa dicapai jika negara-negara bersatu untuk mengatasi ancaman yang ada.

Komitmen untuk mengimplementasikan kerja sama keamanan maritim semakin meningkat; India dan Thailand, yang merupakan negara tetangga yang menguasai jalur utara

Selat Malaka, menunjukkan minat untuk berpartisipasi dalam patroli, dan negara-negara pendiri memberikan respons yang positif. Namun, para petugas yang terlibat dalam patroli tersebut mengungkapkan secara pribadi bahwa patroli trilateral sering kali lebih bersifat “pamer” ketimbang memberikan manfaat nyata, dan masih terlalu dini untuk mengevaluasi dampaknya terhadap pembajakan, penyelundupan, dan kejahatan maritim lainnya di selat itu. (Bradford, 2005, pp. 6-7). Penjelasan diatas menggambarkan upaya dan tantangan dalam meningkatkan kerja sama keamanan maritim di Selat Malaka. Meskipun ada langkah positif menuju kolaborasi, kritik terhadap efektivitas patroli dan kesulitan dalam mengevaluasi dampaknya menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan keamanan yang lebih baik di kawasan tersebut.

Karena itu, kerja sama dalam keamanan maritim di Asia Tenggara saat ini berkembang lebih cepat dibandingkan dekade sebelumnya. Negara-negara telah menunjukkan peningkatan komitmen untuk memperluas MCSBMs (Maritime Cooperative Security and Border Management) dan mengimplementasikan kerja sama. Mayoritas kerja sama baru ini ditujukan untuk mengatasi ancaman transnasional seperti terorisme dan pembajakan. Meskipun masih ada berbagai hambatan serta tidak semua negara berperan secara aktif, oleh karena itu beberapa pengaturan baru telah dibuat, dan komitmen terhadap kerja sama ini telah diperbaharui (Bradford, 2005, pp. 5-6) Penjelasan diatas lebih berfokus terhadap kemajuan signifikan dalam kerja sama keamanan maritim di Asia Tenggara, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Ini mencerminkan upaya kolektif untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks dan mengedepankan kolaborasi sebagai solusi untuk masalah maritim di kawasan tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam memahami dinamika keamanan maritim di Asia Tenggara dan peran kerjasama diplomasi maritim di ASEAN, penerapan teori hubungan internasional menjadi kerangka penting dalam menganalisis. Dalam menganalisis strategi keamanan maritim dan kerjasama diplomasi maritim di Asia Tenggara, teori utama yang digunakan adalah teori keamanan maritim dan teori diplomasi maritim. Kedua teori ini memberikan kerangka analitis yang saling melengkapi dalam mengkaji dinamika keamanan maritim dan peran diplomasi ASEAN di tengah tantangan geopolitik yang kompleks.

Teori Keamanan Maritim

Keamanan maritim merujuk pada upaya perlindungan menyeluruh terhadap wilayah maritim suatu negara, yang mencakup aspek-aspek strategis seperti wilayah perairan,

infrastruktur vital, aktivitas ekonomi, lingkungan laut, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ini berarti keamanan maritim tidak hanya sebatas menjaga kedaulatan wilayah laut dari ancaman tradisional seperti konflik militer atau pelanggaran batas wilayah, tetapi juga mencakup ancaman non-tradisional yang bersifat lintas negara, seperti perompakan, penangkapan ikan ilegal (IUU Fishing), penyelundupan barang, perdagangan manusia, pencemaran lingkungan, dan bencana alam. (Yani, et al., 2017, p.65.).

Keamanan maritim adalah kondisi di mana suatu negara bebas dari ancaman terhadap kepentingan nasionalnya di laut, baik yang bersifat militer maupun non-militer. Ancaman ini mencakup tindakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik, pelanggaran kedaulatan negara, pengabaian hukum nasional dan internasional, eksploitasi ilegal sumber daya laut, serta aktivitas ilegal seperti penyelundupan barang dan manusia melalui jalur maritim. Keamanan maritim, dengan demikian, mencakup perlindungan komprehensif terhadap berbagai aspek strategis di laut yang mendukung kedaulatan dan kepentingan nasional (Palma, 2009, p.31.). Tujuan utama dari keamanan maritim adalah memastikan stabilitas dan keberlanjutan aktivitas di laut, melindungi sumber daya laut untuk mendukung ekonomi nasional, serta menjaga keselamatan masyarakat yang bergantung pada sektor maritim

Diplomasi Maritim

Konsep diplomasi maritim merupakan gagasan yang relatif baru dalam kajian diplomasi dan hubungan internasional, yang mulai berkembang seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap isu-isu maritim dalam dinamika global. Konsep ini menempatkan laut dan wilayah maritim sebagai salah satu elemen strategis dalam pengelolaan hubungan antarnegara. Dalam konteks ini, diplomasi maritim tidak hanya dipahami sebagai alat untuk menyelesaikan konflik di wilayah laut, tetapi juga sebagai kerangka kebijakan yang lebih luas untuk membangun hubungan yang konstruktif di bidang maritim (Sanjiwani, et al, 2022, p.27).

Menurut Christian Le Mière, diplomasi dapat dipahami sebagai seni dan praktik dalam mengelola hubungan internasional antarnegara melalui dialog, negosiasi, dan interaksi. Dalam konteks ini, diplomasi maritim secara spesifik merujuk pada manajemen hubungan internasional yang berfokus pada domain maritim. Dalam diplomasi maritim, fokusnya tidak hanya pada penyelesaian konflik atau ketegangan yang terjadi di wilayah maritim antarnegara (Le Mière. 2014, p. 7).

Diplomasi maritim adalah pendekatan strategis dalam hubungan internasional yang memanfaatkan aset-aset maritim, seperti kapal perang, penjaga pantai, pelabuhan, dan infrastruktur laut lainnya, untuk mencapai tujuan diplomatik. Diplomasi ini tidak hanya

berfokus pada penyelesaian konflik atau ketegangan yang berkaitan dengan wilayah maritim, seperti sengketa batas laut, tetapi juga mencakup upaya untuk memperkuat kerja sama internasional dalam berbagai bidang, seperti keamanan, perdagangan, dan pengelolaan sumber daya laut. Berbeda dari pendekatan hukum laut internasional yang mengandalkan regulasi dan aturan formal untuk menyelesaikan sengketa maritim, diplomasi maritim mengedepankan dialog, negosiasi, dan hubungan multilateral untuk mencapai solusi damai (Setiawan & Zaman, 2020, p.7)..

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka sebagai pendekatan utama untuk menganalisis strategi keamanan maritim di Asia Tenggara, dengan fokus pada kerjasama diplomasi maritim di ASEAN. Metode ini melibatkan pengumpulan, penelaahan, dan analisis berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan dokumen kebijakan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami konsep, teori, dan praktik terkait keamanan maritim serta diplomasi maritim di kawasan Asia Tenggara, khususnya bagaimana ASEAN mengelola tantangan keamanan maritim melalui kerangka diplomasi, serta mengevaluasi efektivitas strategi dan mekanisme kerjasama yang telah diterapkan. Dengan menggunakan kajian pustaka, penelitian ini mengeksplorasi dinamika ancaman maritim, inisiatif kerjasama yang telah dilakukan, dan tantangan yang dihadapi, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang strategi keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Keamanan Maritim di Asia Tenggara

Tantangan keamanan maritim di Asia Tenggara adalah masalah yang cukup kompleks karena melibatkan berbagai jenis ancaman. Ancaman dalam keamanan maritim dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu ancaman tradisional dan ancaman non-tradisional. Ancaman tradisional biasanya terkait dengan konflik atau perselisihan antarnegara mengenai wilayah laut, seperti sengketa batas perairan. Sedangkan ancaman non-tradisional mencakup masalah yang lebih luas, seperti perompakan, penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, dan ancaman terhadap lingkungan laut, yang tidak selalu melibatkan konflik antarnegara tetapi dapat merusak keamanan dan stabilitas kawasan (Ridho, 2020: p.168).

Tantangan Kawasan maritim Asia Tenggara ini mencakup konflik antarnegara, seperti perselisihan klaim wilayah di Laut Cina Selatan, yang melibatkan beberapa negara

dengan kepentingan geopolitik dan ekonomi. Perselisihan wilayah di Laut Cina Selatan antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut. Tumpang tindih klaim atas sumber daya laut dan jalur pelayaran strategis kerap menjadi pemicu konflik, baik secara diplomatik maupun militer. Ketidakjelasan hukum terkait batas maritim semakin memperumit kondisi ini, sehingga menyulitkan negara-negara yang terlibat untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak (Manullang, 2023:p.27).

Selain konflik tradisional tersebut, kawasan ini juga dihadapkan pada ancaman keamanan non-tradisional. Salah satunya adalah kejahatan terorganisir lintas negara (Transnational Organized Crimes/TOC). Dalam pertemuan tingkat tinggi di Majelis Umum PBB pada 17 Juni 2010, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon menyoroti meningkatnya ancaman kejahatan terorganisir lintas negara (Transnational Organized Crimes/TOC), yang mencakup aktivitas seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, perikanan ilegal, hingga penyelundupan senjata, yang mengancam stabilitas dan keselamatan di kawasan tersebut (Marsetio, 2013, p.2).

Konflik yang berhubungan dengan penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing/IUU fishing*) telah menjadi fenomena yang sering terjadi di kawasan Asia Tenggara. Aktivitas IUU fishing tidak hanya mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan, tetapi juga berdampak buruk pada ekosistem laut dan perekonomian negara. Selain itu, ancaman IUU fishing kerap kali beriringan dengan bentuk kejahatan transnasional lainnya. Kejadian-kejadian ini menunjukkan meningkatnya ancaman non-tradisional di wilayah laut Asia Tenggara, yang tidak hanya melibatkan aktor negara tetapi juga aktor non-negara. Gelombang ancaman ini menjadi tantangan serius bagi keamanan maritim Asia Tenggara, terutama karena sifatnya yang kompleks, lintas batas, dan sulit dilacak (Manullang, 2023, p.26).

Kombinasi kedua jenis tantangan ini mendorong negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan untuk mengatasinya. Strategi ini dapat mencakup penguatan kerja sama internasional, utamanya antar negara kawasan Asia Tenggara.

Kerjasama Diplomasi Maritim di ASEAN

a. ASEAN Political-Security Community (APSC)

ASEAN Political-Security Community (APSC) merupakan bentuk kerjasama politik dan keamanan di Asia Tenggara yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan antarnegara anggota ke tingkat yang lebih intens. APSC berupaya memastikan bahwa negara-negara anggota ASEAN dapat hidup dengan damai, tidak hanya di antara

mereka sendiri, tetapi juga dengan negara-negara lain di luar ASEAN. Melalui pendekatan ini, APSC berupaya menciptakan lingkungan yang stabil dan damai untuk mencegah konflik, memperkuat hubungan, dan mendukung kerjasama dengan negara-negara di kawasan maupun global (ASEAN APSC *Blueprint* 2016, p.2).

b. Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DoC)

Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DoC) adalah kesepakatan penting yang ditandatangani pada tahun 2002 oleh negara-negara anggota ASEAN dan Tiongkok. Deklarasi ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi penyelesaian sengketa dan perbedaan pendapat di kawasan Laut Cina Selatan melalui cara-cara damai. Dalam DoC, para pihak sepakat untuk menahan diri dari tindakan-tindakan yang dapat memperkeruh situasi, sambil mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kerjasama di kawasan tersebut. Deklarasi ini juga menekankan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, terutama yang tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), sebagai dasar dalam menyelesaikan sengketa maritim dan mengatur aktivitas di wilayah perairan yang dipersengketakan. Dengan DoC, ASEAN dan Tiongkok menunjukkan komitmen bersama untuk menciptakan mekanisme yang mendukung keamanan dan hubungan baik antarnegara di kawasan yang strategis ini (Duong, 2015).

c. ASEAN Maritime Forum

ASEAN Maritime Forum (AMF) adalah program kerja sama yang dibentuk oleh negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat koordinasi dan penegakan hukum di perairan ASEAN. Forum ini berfungsi sebagai ruang dialog strategis yang membahas berbagai isu kelautan dan maritim, termasuk keamanan maritim. AMF juga mendukung pengelolaan kawasan maritim secara damai, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Pembentukan AMF merupakan bagian dari upaya ASEAN dalam mewujudkan ASEAN *Political-Security Community* (APSC), sebagaimana diuraikan dalam *Blueprint APSC 2009-2015*, khususnya pada butir A.2.5. Dalam butir ini, ditekankan pentingnya upaya regional untuk memperkuat keamanan maritim (Oktavian, 2023, p.236).

d. Patroli bersama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Laut Sulu

Pada Mei 2016, Indonesia, Malaysia, dan Filipina mencapai kesepakatan untuk memperkuat keamanan di Laut Sulu-Sulawesi, kawasan strategis yang sering

menghadapi ancaman perompakan, penyelundupan, dan aktivitas kelompok kriminal bersenjata. Melalui kesepakatan yang dikenal sebagai *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA), ketiga negara sepakat untuk melakukan patroli bersama guna meningkatkan pengawasan terhadap ancaman di wilayah tersebut. Kesepakatan ini diimplementasikan secara konkret pada Juni 2017, setelah mereka secara resmi meluncurkan *Trilateral Maritime Patrol* (Indomalphi) sebagai langkah awal untuk mengamankan jalur pelayaran yang vital bagi perdagangan internasional. Inisiatif ini kemudian diperluas pada Oktober 2017 dengan peluncuran *Trilateral Air Patrol*, yang melibatkan pengawasan udara untuk mendukung patroli maritim. Upaya trilateral ini merupakan upaya intens antara ketiga negara dalam mengatasi tantangan keamanan maritim di Laut Sulu-Sulawesi, untuk memperkuat stabilitas kawasan melalui kerja sama regional (Roza, 2018, p.11).

e. ASEAN Coast Guard Forum (ACGF)

Inisiatif terbaru ASEAN dalam menjaga keamanan maritim adalah pembentukan *ASEAN Coast Guard Forum* (ACGF), sebuah wadah kerja sama regional yang berfokus pada peran penjaga pantai (*coast guard*) negara-negara anggota ASEAN. Forum ini menggunakan pendekatan baru dalam menangani isu keamanan maritim, yaitu melalui keterlibatan lembaga-lembaga non-militer seperti penjaga pantai, alih-alih mengandalkan angkatan laut yang berorientasi militer. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan suasana kerja sama yang lebih inklusif dan non-konfrontasional, sehingga mampu mengurangi ketegangan geopolitik dan memperkuat koordinasi dalam menangani ancaman non-tradisional di perairan Asia Tenggara, seperti perompakan, penyelundupan, penangkapan ikan ilegal, dan pencemaran laut (Manullang, 2023:p.22).

5. KESIMPULAN

Kerja sama keamanan maritim di Asia Tenggara telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir meskipun menghadapi tantangan kompleks, baik dari ancaman tradisional seperti sengketa wilayah, maupun ancaman non-tradisional seperti perompakan, penangkapan ikan ilegal, dan penyelundupan. Kawasan ini memiliki posisi strategis dalam geopolitik global, sehingga menarik perhatian negara-negara besar seperti Jepang dan China untuk memperkuat pengaruh mereka melalui program kerja sama maritim. Sementara itu, diplomasi maritim melalui ASEAN memainkan peran penting dalam mendorong stabilitas kawasan. Inisiatif seperti *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DoC), ASEAN Maritime Forum (AMF), dan patroli trilateral (Trilateral

Maritime Patrol) di Laut Sulu-Sulawesi menunjukkan komitmen negara-negara anggota untuk bekerja sama menghadapi tantangan keamanan. Selain itu, kerangka kerja seperti ASEAN Political-Security Community (APSC) telah menyediakan platform untuk memperkuat hubungan politik dan keamanan di kawasan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Besar atas selesainya tulisan ini dan terima kasih terhadap dosen-dosen yang telah membimbing dan membantu saya dalam menyelesaikan tulisan ini dengan tepat waktu. Terima kasih juga terhadap kedua orangtua saya atas doa dan dukungannya dalam menyelesaikan tulisan ini. Terimakasih kepada Teman-teman saya SARKODES karena telah membantu dan menyemangati saya dalam menyelesaikan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN Secretariat Jakarta. (2016). *ASEAN political-security community blueprint 2025*.
- Bradford, J. F. (2005). The growing prospects for maritime security cooperation in Southeast Asia. *Naval War College Review*, 58(3). Retrieved from <https://digital-commons.usnwc.edu/nwc-review/vol58/iss3/4>
- Duong, H. (n.d.). A fair and effective code of conduct for the South China Sea. *Asia Maritime Transparency Initiative*. Retrieved from <https://amti.csis.org/a-fair-and-effective-code-of-conduct-for-the-south-china-sea/>
- Le Mière, C. (2014). *Maritime diplomacy in the 21st century: Drivers and challenges* (p. 7).
- Llewelyn, J. D. (2017). Preventive diplomacy and the role of civil maritime security cooperation in Southeast Asia. *Strategic Analysis*, 41(1). <http://dx.doi.org/10.1080/09700161.2016.1249178>
- Manullang, A. J. (2023). Mendorong upaya peningkatan keamanan maritim ASEAN: Kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN Coast Guard Forum. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 8(2).
- Marsetio, L. T. (2013). Perairan bermasalah: Tantangan maritim di Asia Pasifik. *Jurnal Pertahanan*, 3(2), 2.
- Oktavian, A. (2023). Penguatan kerjasama ASEAN Maritime Forum (AMF) dalam penanganan kejahatan lintas negara. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, 5(3), 236.
- Palma, M. A. E. (2009). Legal and political responses to maritime security challenges in the Strait of Malacca and Singapore. *Canadian Consortium on Asia Pacific Security (CANCAPS)*, 31.

- Ridho, M. (2020). Signifikansi keamanan maritim di ASEAN. *MANDALA: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 3(1), 168.
- Roza, R. (2018). Keamanan Laut Sulu-Sulawesi: Kaji ulang kerja sama trilateral? *Bidang Hubungan Internasional*, X(20), 11.
- Sanjiwani, N. P. A., et al. (2022). Upaya diplomasi maritim pemerintahan Joko Widodo dalam mewujudkan pilar keamanan poros maritim dunia. *IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse*, 4(1), 27.
- Setiawan, A., & Zaman, A. N. (2020). *Diplomasi maritim Indonesia dalam menjaga kedaulatan Kepulauan Natuna 2014-2019*. Jakarta: UM Jakarta Press.
- Yani, Y. M., et al. (2017). *Pengantar studi keamanan* (p. 65). Malang: Intrans Publishing.